

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan tentang Implementasi Hasil Reses DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Penyusunan Kebijakan APBD di Kota Gorontalo maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi hasil reses DPRD dalam penyusunan kebijakan APBD yang dikaji dari: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pelaporan dinilai belum berjalan efektif. Pelaporan kegiatan hasil Reses perlu di optimalkan melalui penyampaian format laporan yang baku agar hasil reses dapat di tuangkan dalam dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD sehingga dapat di evaluasi dan di tindaklanjuti sebagai usulan DPRD dalam penyusunan kebijakan APBD . Faktor penentu keberhasilan implementasi hasil reses DPRD, yang dikaji dari: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dari ketiga faktor penentu tersebut, faktor yang paling determinan adalah Sumber Daya Manusia karena sumberdaya manusia dinilai belum mampu untuk mengimplementasikan hasil reses dalam kebijakan penyusunan APBD sehingga kedepannya perlu adanya peningkatan kompetensi dan pengetahuan bagi aparatur di Sekretariat DPRD Kota Gorontalo baik melalui pendidikan formal maupun informal agar dapat mengimplementasikan hasil Reses tersebut, kemudian faktor yang kedua yang paling determinan adalah komunikasi, karena komunikasi penting bagi Anggota DPRD saat bertatapan

dengan masyarakat pada saat reses dan dalam menindaklanjuti hasil reses pada rapat-rapat DPRD. Komunikasi informasi yang kurang jelas, tidak bertransmisi, dan tidak konsisten dapat berpengaruh pada Implementasi hasil reses dalam kebijakan penyusunan APBD.

#### **A. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan Kegiatan hasil Reses perlu di optimalkan melalui penyampaian format laporan yang baku agar hasil reses dapat di tuangkan ke dalam dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD sehingga hasil reses dapat di evaluasi dan sebagai usulan DPRD dalam penyusunan kebijakan APBD untuk tahun berikutnya.
2. Perlu pendidikan pelatihan kompetensi bagi Aparatur di Sekretariat DPRD agar optimal dalam mengimplemantasikan kegiatan reses anggota DPRD.
3. Memfungsikan pelaksanaan tugas masing masing pendamping reses guna efektif pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran sehingga semua aparatur fokus bekerja dalam mengimplementasikan reses.
4. Tata Tertib DPRD sebaiknya memuat mekanisme dari perencanaan , pelaksanaan , dan pelaporan yang lebih rinci dan sistimatis sehingga dapat di jadikan panduan bagi Anggota DPRD dalam mengimplementasikan Reses DPRD.
5. Disarankan hasil Reses DPRD yang berupa Pokok Pokok Pikiran DPRD agar di paripurnakan untuk menjadi acuan dalam mengimplementasikan hasil Reses dalam penyusunan APBD Kota Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri, 2011. Pelayanan Publik Kompetensi dan Komitmen Aparat Dalam Pelayanan Perizinan Terpadu. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press.
- Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. 2016. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung
- Ali, dkk. 2017. Perkembangan Pelayanan Publik Di Indonesia. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Asshiddiqie. 2008. Peran Anggota DPRD Perempuan untuk Menghasilkan Kebijakan Publik Responsif Gender (Studi Kasus Kabupaten Maros dan Kota Parepare). Tesis Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Dharma, Surya. 2011. Manajemen Kinerja Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ekowati, A. 2016. Organisasi, kepemimpinan dan perilaku administrasi Jakarta: CV Haji Mas Agung
- Gie, Peserta didik. 2012. Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ideris. 2017. Peran DPRD Jawa Barat Dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik.” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, V (1): 57-68.
- Julio, Thomas. 2015. Rekonsiliasi Kebijakan Publik. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Jones. 1991 Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Press
- Kartawidjaja, Darajat, 2018. Kebijakan Publik. Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bandung: Alfabeta
- Madani, Agung. 2011. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gramedia
- Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Nawawi Ismail, 2009. Publik Policy. Surabaya: ITS Press
- Nugroho, Riant. 2014. Publik Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

- Pasolong, Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik. Bandung: CV. Alfabeta
- , 2011. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmi. 2014. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Cetakan keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ridwan. 2016. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Eresco
- Santoso, Agus. 2018. implementasi kebijakan publik, Bandung: AIPI Bandung
- Simon, Danial. 2013. Pengantar Ilmu Manajemen. Bandung: Refika Aditama
- Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Surmayadi, D. 2004. Manajemen MUtu Pendidikan. Bandung: ALfabeta
- Soetjipto et al., 2014. Kajian Hukum Reses Partisipatif: Studi Kasus Pelaksanaan Reses Partisipatif oleh Anggota DPRD Parepare dan Ambon. Tesis Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia, Makassa
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, Teori Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Syaukani, dkk. 2004. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2013 Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards. Yogyakarta :Lukman Offset
- Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2
- Thomas, Nogi. S. 2008. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2013. Pengantar Administrasi Jakarta: Graha Ilmu
- Tahir, Arifin, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bandung: CV Alvabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara

Wibowo, AG. 2014. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Widodo Suparno. 2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta:

Winarno, 2012 Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus : Edisi dan Revisi Terbaru. Jakarta: Bumi Aksara

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Tata Tertib DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 21 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File\\_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf](https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/253036/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf)

<https://www.bentengsumbar.com/2014/01/kebijakan-publik-dalam-pengambilan.html>

<https://konsultasiskripsi.com/2020/03/17/faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan-publik-skripsi-dantesis/>

<http://eprints.umm.ac.id/55637/3/BAB%20II.pdf>